**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**
2. **Pengertian Pemberdayaan**

Menurut bahasa pemberdayaan berasal dari kata “*Daya*” yang memiliki arti “tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan”.[[1]](#footnote-1) Dalam berbagai variannya disebut 33 kali. Dalam bahasa arab disebut “*al*-*Quwwah*”.[[2]](#footnote-2) Sedangkan di dalam bahasa Inggris sendiri pemberdayaan disebut “*empower*” yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam sleeby yang dikutip oleh Hatta. Kartasasmita mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu ”proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan .[[3]](#footnote-3)

Pemberdayaan sendiri adalah sebuah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai ketrampilan mewujudakan gagasannya menjadi realitas.

Pemberdayaan juga merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Seorang karyawan memiliki wewenang dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu, jauh melebihi tugasnya sehari-hari.

Robbins mengatakan yang dikutip pada buku “Manajemen Kinerja” memberikan pengertian yaitu :

Pemberdayaan sebagai menempatkan pekerja bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, manajer belajar untuk berhenti mengontrol dan pekerja belajar bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaannya dan membuat keputusan yang tepat. Pemberdayaan dapat mengubah gaya kepimpinan, hubungan kekuasaan, cara pekerjaan dirancang, dan cara organisasi distrukturkan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses dimana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonomi dan keleluasan dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Pemberdayaan merupakan kontinum antara keadaan pekerja yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertimbangkan bagaimana mengerjakan pekerjaan, sampai pada keadaan di mana pekerja memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dengan pemberdayaan, telah terjadi pergeseran kekuasaan kepada tim pekerja yang diperbolehkan membuat keputusan sendiri.

Sementara itu, Newstrom dan Davis yang dikutip pada buku “Manajemen Kinerja” menyatakan bahwa : Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang memperngaruhi prestasi kerja. [[4]](#footnote-4)

Maka, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih terberdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

Pemberdayaan dapat mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Dengan demikian, akan meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga kinerjanya meningkat. Pekerja yang diberdayakan diharapkan melakukan pekrjaan melebihi tanggung jawab yang diberikan kepada meraka.[[5]](#footnote-5)

Pemberdayaan yaitu aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.[[6]](#footnote-6) Pentingnya pembangunan masyarakat menitik beratkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.[[7]](#footnote-7)

Dapat diberi kesimpulan bahwa konsep dasar pada pemberdayaan pada dasarnya yaitu sebuah upaya suatu kelompok masyarakat untuk dalam meningkatkan kemampuan serta kemandirian sehingga masyarakat dapat membangun dan mengaktualisasikan segala potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tercapainya tujuan hidup yang lebih sejahtera.

Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebh dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.[[8]](#footnote-8)

1. **Konsep Pemberdayaan**

Kegiatan membangun masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Salah satu pengembangan potensi manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan berbasis kemasyarakatan. Kegiatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan permasalahan oleh masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya.[[9]](#footnote-9)

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.[[10]](#footnote-10)

Pemberdayaan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis modern. Dengan pemberdayaan, bisnis menjadi lebih dekat dengan pelanggan, dapat memperbaiki pelayanan pengirim barang, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya memenangkan kompetisi. Hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai oraganisasi menemukan cara memberdayakan orangnya. Smith memandang ada dua hal yang menyebabkan perlunya pemberdayaan.

*Pertama*, adalah karena karena lingkungan eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis di abad ke-21 bekerja dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak dapat diduga.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan , yaitu sebagai berikut :

1. Semakin intensinya kompetisi sehingga organisasi perlu memberdayakan orang untuk melawan tantangan kompetisi.
2. Inovasi teknologi berubah cepat sehingga organisasi perlu memberdayakan orang lain untuk menggunakan sebaik mungkin tegnologi maju.
3. Permintaan yang tetap atsa kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang lebih baik menyebabkan organisasi perlu memberdayakan orang untuk menemukan cara inovatif guna memperbaiki produk dan jasa.
4. Tumbuhnya masalah ekologi menuntut organisasi perlu memberdayakan orang untuk melaksanakan kebijakan ekologi.

*Kedua* adalah karena orangnya sendiri berubah. Sejak lama manajer memandang orang sebagai sumber daya yang paling berharga. Akhirnya, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih tergantung pada bakat dan kecerdasan orangnya daripada pada faktor tanah, bangunan, pabrik, dan mesin. Pekerja benar-benar menjadi intellectual capital organisasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang menjadi inti dalam memberdayakan masyarakat yaitu :

1. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masayrakat untyk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/media yang dipandang efektif.
3. Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap bargaining power masarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
4. Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu, kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

1. **Tugas dan Manfaat Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Dalam hal pada setiap desa telah terbentuk KPM, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpim (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat (lihat Kutut maka maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud.[[11]](#footnote-11)

Apabila suatu organisasi menjalankan pemberdayaan, di kalangan anggota organisasi akan tumbuh perasaan menjadi bagian dari kelompok. Tumbuh perasaan puas dalam mengambil tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya. Terdapat perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berharga dan memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi dan kerjasama dengan orang lain.

Dengan demikian, pemberdayaan meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu. Akibatnya akan terjadi peningkatan kepuasan kerja, kerjasama yang lebih dekat dengan orang lain, bekerja dengan tujuan yang lebih jelas, dan mendapatkan prestasi apabila tujuan tercapai. Pengakuan merupakan penghargaan sehingga menyebabkan orang yang bekerja melihat sinar baru dan lebih menghargai.

Bagi organisasi, pemberdayaan akan meningkatkan kinerja organisasi dan individu yang dapat mengembangkan bakatnya secara penuh. Departemen atau tim menjadi lebih antusias, aktif, dan sukses. Karyawan menguasai pemahaman dan keterampilan baru dan dengan memberi kesempatan melihat sesuatu dengan cara berbeda, merefleksikan apa yang dilihat dan mengembangkan keterampilan baru.

Sementara itu, manajer terdorong untuk bekerja lebih keras, di samping harus mengerjakan pekerjaan rutin, yaitu berhadapan dengan masalah dan krisis dalam memberdayakan karyawannya. Perkembangan karier akan memberi kontribusi lebih besar pada keberhasilan jangka panjang organisasi dan meningkatkan prospek untuk memperoleh promosi.

Dalam situasi di mana organisasi kinerjanya rendah, produktivitas atau profitabilitas, akan meningkat apabila manajer memberdayakan karyawannya.[[12]](#footnote-12)

1. **Hambatan Pemberdayaan**

Di dalam organisasi Banyak yang mengalami gagal dalam memperbaiki diri karena manajer yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan tidak peduli atas masalah yang dihadapi. Sementara itu, orang yang berada di garis depan, yang memahami persoalannya, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu. Sering kali suatu organisasi membayar konsultan dengan mahal untuk memberitahu mereka bagaimana memperbaiki proses pekerjaan, padahal bawahannya dapat melakukannya.

Suatu keinginan untuk melakukan pemberdayaan sering kali menghadapi banyak resistensi. Di satu sisi terdapat perasaan takut karena tidak pernah melakukan sebelumnya atau mungkin merasa telah pernah melakukan langkah pemberdayaan sebelumnya, namun tidak berjalan seperti diharapkan. Dengan demikian, muncul pandangan bahwa pemberdayaan pada organisasinya tidak akan berjalan sehingga tidak merasa perlu berubah karena keadaan sekarang dirasakan baik saja.[[13]](#footnote-13)

1. **Memberdayakan Masyarakat**

Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

*Strategi 1* **:** Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga- lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

# *Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan*, pemerintah di negara-negara berkembang termasuk indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu :

# Pembangunan Pertanian,

# Industrialisasi Pedesaan,

# Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu dan,

# Strategi Pusat Pertumbuhan.

Adapun keterangan dari macam-macam program tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju.
2. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan.
3. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, antara lain yaitu:

1. Pembangunan pertanian dengan padat karya,
2. Memperluas kesempatan kerja,
3. Intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil mandiri,
4. Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan,
5. dan membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek *multi-sektor*.

Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan. produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara eknomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun, mengajukan strategi yang meliputi :

1. Startegi pembangunan gotong royong,
2. Strategi pembangunan Teknikal – Profesional,
3. Strategi Konflik,
4. Strategi pembelotan kultural.

*Strategi 3 Gotong royong*, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong-royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

*Strategi 4 Pembangunan Teknikal-Profesional*, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara-cara yang lebih kreatif sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

*Strategi 5 Konflik*, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasasi oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan oraganisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

*Strategi 6 pembelotan kultural*, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesame dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah *humanis-relegius*. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kalurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan.

Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah :

1. Mempercepat Perubahan (*Enabler*),
2. Perantara (*Mediator*),
3. Pendidik (*Educator*),
4. Perencana (*Planer*),
5. Advokasi (*Advocation*),
6. Aktivis (*Activist*) dan,
7. Pelaksana Teknis (*Technisi Roles*).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan Strategi pembangunan *Teknikal Profesional*.

Memberdayakan bawahan merupakan hal yang sangat penting, namun baru akan memberikan hasil apabila terdapat hubungan baik atasan dan bawahan. Hubungan baik akan dapat memberdayakan orang karena mendorong komunikasi reguler dan terbuka. Saran setiap orang akan didengar dan dipertimbangkan dan dapat memahami setiap kekurangan keahlian. [[14]](#footnote-14)

Sebaliknya, hubungan buruk akan menghalangi pemberdayaan karena mencegah orang lain mendapat informasi tentang pembangunan dan kemajuan, menumbuhkan permusuhan dan ketidakpercayaan di antara individu, yang mungkin mencegah orang yang tepat bekerja bersama. Kesulitan dalam membuat keputusan karena konflik tidak dapat diselesaikan dengan akibat frustasi dan hilangnya moral bawahan.

Untuk itu, langkah yang harus dilakukan manajer adalah dengan mencoba menciptakan hubungan di mana anggota tim merasa dihargai, di mana mereka dapat mengambil risiko, dan belajar bagaimana menjadi percaya diri. Dengan demikian, akan menghilangkan perasaan ketergantungan pada orang lain.

Menghilangkan ketergantungan tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan apresiasi atas apa yang dicapai anggota tim,
2. Bersikap jujur dan terbuka kepada bawahan,
3. Bersedia mengambil sikap positif dalam semua tindakannya dan,
4. Mampu memberikan dorongan kepada orang lain.[[15]](#footnote-15)
5. **TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan /ketidakberdayaan.[[16]](#footnote-16) Sedangkan pemberdayaan sendiri adalah sebuah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke masa kinian yang telah umum digunakan Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarak mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.[[17]](#footnote-17)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.[[18]](#footnote-18)

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.[[19]](#footnote-19)

1. **PARADIGMA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, inilah yang membedakan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah di eluelukan sebagai suatu yang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Good governance adalah tata pemerintah yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta. [[20]](#footnote-20)

1. **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN**

Prespektif patisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tjokowinoto yakni :

Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan menggunakan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan pendekatan ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapam program, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk menacapai yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memapukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar.[[21]](#footnote-21)

Dari pemahaman tetang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga tidak lagi harus diidentifikasikan sebagai kelompok sasaran. Harus memandang mereka sebagai pemanfaatan yang diharapkan. Merekalah yang diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar

terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi

aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya.

Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (beneficiaries) mempengaruhi arah pelaksanaan proyek pembangunan dari pada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.

1. **PROGRAM EKONOMI KELUARGA HARAPAN (PKH)**
2. **Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miarmengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pem bangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat.

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkat-kan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk mmenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.[[22]](#footnote-22)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari *power* atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”, “kekuatan” ataupun “kekuasaan”) serta hubungan antarindividu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*), seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan, dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antarindividu, dengan dikotomi subjek (penguasa) dan objek yang dikuasai meliputi kaya-miskin, laki-laki- perempuan, guru-murid, pemerintah-warganya, serta antaragen pembangunan dan si miskin. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.[[23]](#footnote-23)

1. **Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi,
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran,
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.

Kooptasi sitem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, masyarakat yang berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).[[24]](#footnote-24)

1. **Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pada tahun 2007, pemerintah lewat Kementerian Sosial membuat sebuah kerangka program untuk keluarga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku keluarga yang kurang mendukung, upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Pada aturan awal pemberiannya sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Kemudian pada tahun 2016 komponen itu ditambah menjadi lansia berisiko tinggi dan penyandang disabilitas berat. Salah satu kota dengan penerima bantuan PKH adalah Kota Lampung Selatan. PKH hadir di Kota Lampung pada tahun 2011 sebagai salah satu program dengan basis pemberian bantuan tunai kepada peserta PKH yaitu ibu-ibu rumah tangga.

Pemberdayaan dalam PKH terdiri dari KPM dengan di bagi menurut kelompok-kelompok dan memiliki pendamping serta operator dalam menjalankannya. Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sendiri terdapat 7867 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan. Penerima bantuan PKH di Kecamatan Natar di tahun 2018 perjuni sudah mencapai 5063 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima bantuan ini tersebar di dalam satu kecamatan sebanyak 26 desa yang penerima manfaat PKH.

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipilih sebagai daerah penelitian karena pada kelompok PKH disana terdapat kemajemukan karakteristik kelompok dalam menjalankan pemberdayaan dari PPKH kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam pemberdayaannya di Kecamatan Natar ini terdapat beberapa dimensi untuk melihat berjalannya program ini yaitu tingkat partisipasi KPM dalam menjalankan program pemberdayaan, motivasi, kemitraan, proses yang ada didalamnya dan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku.

Inilah yang kemudian menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan PPKH Kecamatan Natar dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH sendiri merupakan salah satu program perlindungan sosial yang menanggulangi terkait masalah kemiskinan di kecamatan terseut khususnya. Selain program ini aplikasinya diberikan pada keluarga yang membutuhkan penanganan dalam mengentaskan kemiskinan, program PKH pun memberikan pemberdayaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat merubah pola pikir keluarga tersebut. Sehingga dari perubahan tersebutlah di kemudian hari akan muncul inisiatif dari masyarakat penerima bantuan tersebut untuk tidak terjebak kemiskinan dan akan dapat bangkit dari segala bentuk kemiskinan menuju masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kreatif dan mampu bertumpu membangun keluarganya.

Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan memperkuat dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Pendekatan Pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan Shardlow dalam Adi melihat berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan atau *power* yang digunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat golongan lemah dalam hal ini masyarakat miskin, agar dapat melakukan kegiatan atau program yang lebih berdaya dan lebih memiliki kehidupan yang optimal dari sebelumnya. Pemberdayaan juga dalam rangka memaksimalkan usaha dan memberikan batu loncatan masyarakat untuk memandirikan dari segi ekonomi dan sosial.[[25]](#footnote-25)

Pada dasarnya cita-cita PKH adalah untuk memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran yang diberdayakan agar sejalan dengan tujuan PKH yaitu untuk memberantas kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan memutus rantai kemiskinan. Terdapat tiga unsur dalam pelaksanaan pemberdayaan PKH yaitu strategi, proses dan perubahan pola pikir, sikap, serta perilaku. Dari pemberdayaan PKH di Kecamatan Natar sendiri rata-rata sudah memiliki kemajuan masing-masing. Walaupun terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bisa saja dari diri masing-masing individu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat berupa tidak adanya modal, alat maupun waktu dalam pengerjaannya.

Dalam strategi pemberdayaan PKH terdapat tiga aspek yaitu partisipasi, motivasi dan Kemitraan. Partisipasi membahas mengenai tingkat kehadiran peserta dalam pemberdayaan. Pada pemberdayaan FDS dan pelatihan jumlah peserta yang hadir sudah cukup baik yaitu hampir 98%. Namun pada pemberdayaan KUBE hanya setengah dari jumlah KPM yang mengikuti pemberdayaan dikarenakan kesibukan setiap KPM. Sedangkan motivasi setiap KPM dalam mengikuti pemberdayaan sangat di tentukan melalui kewajiban, peraturan dan dorongan dari diri sendiri untuk merubah kondisi kemiskinan. Pemberdayaan FDS dan pelatihan terdapat peraturan yang disepakati bersama, yaitu mengenai keterlambatan dan ketidakhadiran peserta. Masalah utama yang ditekankan melalui dua pemberdayaan ini adalah masalah keterlambatan KPM dalam mengikuti kegiatan.

Sedangkan pada pemberdayaan KUBE motivasi masih terlihat rendah karena pemberdayaan ini baru saja terbentuk satu tahun yang lalu. Selain itu belum ada pertemuan kelompok dan Proses pemberdayaan ini merupakan berjalannya pemberdayaan PKH yaitu FDS, pelatihan dan KUBE serta kendala yang dihadapi dalam berjalannya pemberdayaan. Setiap pemberdayaan memiliki prosesnya masing-masing sehingga perlu penjabaran atas ketiganya.

Pemberdayaan FDS sudah berjalan hampir empat tahun dan merupakan pemberdayaan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari KPM. Walaupun awal terbentuknya masih memiliki hambatan akibat pendamping yang *resign*, tapi proses diadakannya FDS untuk menyadarkan mereka mengenai pendidikan, kesehatan dan pola pengasuhan anak berjalan dengan lancar. Setelah melalui proses pemberdayaan ini maka diharapkan KPM memiliki *mind frame* yang berbeda dari sebelum diadakan FDS ini.

Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dapat ditunjukkan melalui perubahan sikap dalam masing-masing KPM serta menyadari kondisi kemiskinan mereka dan keinginan mereka untuk lepas dari kemiskinan. Perubahan ini berupa keinginan menuju peningkatan ekonomi keluarga baik dari usaha sendiri maupun melalui pelatihan Beberapa KPM telah sadar untuk mengubah pola perilaku mereka dalam mengatasi kemiskinan sehingga berdampak pada penambahan penghasilan dalam keluarganya. Tapi tidak dipungkiri bahwa beberapa lainnya juga masih belum mampu dalam mengatasi kemiskinannya. Pemberdayaan masih terus mengalami perkembangan dengan pengarahan serta bimbingan dari PKH.

Kemandirian dari KPM sudah terlihat dari perubahan pola pikir, sikap dan perilaku serta mengalami proses keberlanjutan setiap tahunnya, namun bukan berarti KPM telah mandiri. Pendamping Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan juga mengharapkan masih adanya inovasi yang dikembangkan pemerintah untuk pemberdayaan ini agar produk-produk dari pemberdayaan PKH dapat bersaing dengan produk-produk lokal lainnya.Tahap pemberdayaan masih berlangsung menuju KPM yang mandiri.

Selama perkembangannya pemberdayaan PKH mengandung unsur awal mulanya mengatur penyesuaian program dengan keadaan KPM sebagai pelaku pemberdayaan. Setelah itu PKH menemukan pemberdayaan apa yang cocok dan dapat digunakan dengan cepat serta menghasilkan pendapatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Maka dalam pengerjaannya PKH mulai mengatur strategi kemudian melewati proses dari masing-masing pemberdayaan yang ada kemudian terakhir PKH dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan ini merubah pola pemikiran, sikap dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui semua tahap ini PKH dapat mengetahui apakah pemberdayaan ini sudah mengakibatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muahammad Fuad al-Baqi’, *Mu’jam al-Mufaras al-Fad al-Quran al-Karim*, DAR AlfIkr, hlm. 587-558 [↑](#footnote-ref-2)
3. Edhi Martono, *“Jurnal Ketahanan Nasional”* 28 Desember 2015, h. 2-3 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, h. 344 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, h. 349 [↑](#footnote-ref-5)
6. Onny. S. Prijiono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Falah Production, 2001), h. 256 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 31 [↑](#footnote-ref-8)
9. Puji Hadiyanti**,** Perspektif Ilmu Pendidikan - Vol. 17 Th. IX April 2008, h. 90 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibit* h. 91 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Opcit*, h 6-7 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, h. 353 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, h. 354 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibit, h. 6 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, h. 356 [↑](#footnote-ref-15)
16. Cholisin, *Pemberdayaan* *Masyarakat*, Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman,19-20 Desember 2011 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sumodiningrat Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta:Bina Rena Pawira, 1997), h. 74 [↑](#footnote-ref-17)
18. Lifa Indri Astuti Dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan”*, h. 12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ambar Teguh Sulistyani, Ke*mitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 83 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anisa Hartiwi Wulandari,*“Strategi Pengunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 37 [↑](#footnote-ref-20)
21. Tjokowinoroto, Moeljarto, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah Strategi,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 44-45 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ully Hikmah Andini dkk. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 12,* h. 9 [↑](#footnote-ref-22)
23. Puji Hadiyanti**,** *Perspektif Ilmu Pendidikan* - Vol. 17 Th. IX April (2008, Jakarta Timur), h. 91 [↑](#footnote-ref-23)
24. Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiya Press, 2000), h. 1-2 [↑](#footnote-ref-24)
25. Elga Jatu Nataya, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 2 Tahun 2017, h. 2-5 [↑](#footnote-ref-25)